

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Zulkifli. (2017). "Strategi Pencegahan Korupsi di Desa: Implementasi Kebijakan Desa Antikorupsi." *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 101-117.
- Arief Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta: Kencana, 2011), 45.
- Arief Barda Nawawi. 2019. *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Arief Barda Nawawi. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Amirudin dan Zainal Asikin. 2017. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), "*Laporan Pengawasan Keuangan Desa*," 2022.
- BUKU :
- Fabryan. 2019. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pemalsuan Aset Otentik Yang Dilakukan Oleh Notaris. *Jurnal Media of Law and Sharia*. Volume 1, Nomor 1.
- Firmansyah, A. (2017). Penerapan Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi: Studi Kasus Perbedaan Peran Pejabat dan Bukan Pejabat. *INOVATIF | Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 45-58. Retrieved from <https://www.online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/2116>
- Guza, Afnil. 2019. *KUHAP Lengkap*. Jakarta : ASA Mandiri.
- Hamzah, Andi. 2017. *Asas Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Hamzah, Hatrik. 2019. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo.
- Hamzah, Hatrik. 2016. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana (Strict Liability dan Vicarious Liability)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Haris, Muhammad. "Evaluasi Implementasi Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik." *Jurnal Hukum dan Keterbukaan Informasi*, vol. 27, no. 2, 2023, pp. 150-165.

- Harahap, M. Yahya. (2014). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hendrawan, A. (2022). Implementasi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam Penegakan Hukum Korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 35(2), 123-145.
- Hukumonline. (2020). Analisis UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang Diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001. *Hukumonline Journal*, 15(2), 233-245. Retrieved from <https://jurnal.hukumonline.com>
- Iyas, Amir. 2022. *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta : Rangkang Education.
- Jurnal Ilmu Hukum, "Korupsi di Desa: Studi Kasus Penyalahgunaan Dana BUMDes,"* Vol. 12, No. 1, 2021.
- Kementerian Desa, *Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia*. "Peran BUMDes dalam Membangun Desa." <https://www.kemendes.go.id>.
- Lamintang, P.A.F. 2020. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Mahrus, Ali. 2011. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008
- Moeljatno. 2018. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*. Jakarta : Bina Aksara.
- Nugroho, H. (2020). *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999*. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 15(3), 245-259.
- Prakoso, Djoko. 2017. *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta : Liberty.
- Prasetyo, A. "Pengawasan Partisipatif dalam Pengelolaan Dana Desa," *Jurnal Akuntabilitas dan Transparansi Desa*, Vol. 3, No. 1, 2021.
- Prabowo, Agus. 2023. "Implikasi Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 terhadap Pembuktian Kasus Korupsi." *Jurnal Hukum dan Korupsi* 30 (3): 145-160.

- Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu, Nomor: 24/PID.SUS-TPK/2023/PN BGL, 2023.
- Purnomo, D. H. (2021). *Penerapan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999: Perspektif Hukum Pidana*. Jurnal Hukum Pidana Indonesia, 12(1), 89-104.
- Rommelink, Jan. 2023. *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia)*. Jakarta: Gramedia.
- R. H. McCormick, *Perspectives on Corruption: A Study of Corruption in Developing Countries* (New York: Oxford University Press, 2021), 67-72.
- Romli Atmasasmita. 2020. *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta : Yayasan LBH.
- R. Soesilo. 2018. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Bogor : Poletiea.
- Sari, Maya. "Analisis Implementasi Pasal 26 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam Pengelolaan Dana Desa." *Jurnal Administrasi Desa*, vol. 42, no. 1, 2023, pp. 75-90.
- Sulaiman, M. "Implementasi Hukum Pidana Korupsi di Desa: Studi Kasus Dana Desa," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 15, No. 3, 2019.
- Suparlan, P. (1999). *Kebudayaan dan Pembangunan di Pedesaan*. Jakarta: Lembaga Penelitian SMERU.
- Suparman, B. "Korupsi di Tingkat Desa: Analisis Penyebab dan Dampaknya," *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Desa*, Vol. 8, No. 2, 2020.
- Suryani, D. (2023). Implementasi Pasal 184 ayat (1) KUHAP dalam Pengaturan Alat Bukti di Pengadilan. *Jurnal Hukum Indonesia*, 45(1), 89-104.
- Suryadi, *Hukum Pidana Korupsi: Konsep dan Implementasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 100-105.
- Sutrisno, Bambang. 2023. "Analisis Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Konteks Kemandirian Peradilan." *Jurnal Hukum dan Keadilan* 33 (1): 75-90.
- Tanjung, M. S. (2019). *Analisis Pasal 2 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 49(2), 177-192. DOI: 10.21143/jhp.vol49.no2.2008.
- Taufik, Ahmad. *Korupsi dan Pertanggungjawaban Hukum*. Jakarta: Penerbit Elang, 2022.

Transparency International, *Corruption Perceptions Index 2023*, Transparency International, 2023, <https://www.transparency.org/en/cpi/2023/index/nzl>.

## LAMPIRAN DOKUMTASI

**Gambar 1** : penyerahan surat izin penelitian di pengadilan negeri bengkulu pada hari kamis, 4 juli 2024, jam 11.36



**Gambar 2** : hasil dari Wawancara kepada Dr. Lia Giftiyani, SH., M.Hum, Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu. Rabu, 10 juli 2024, jam 10.08 sampai selesai



